

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan fundamental yang menjadi fokus utama pemerintah di berbagai negara, terutama negara dengan jumlah penduduk besar seperti Indonesia. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga berimplikasi luas terhadap stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi, serta arah pembangunan nasional.

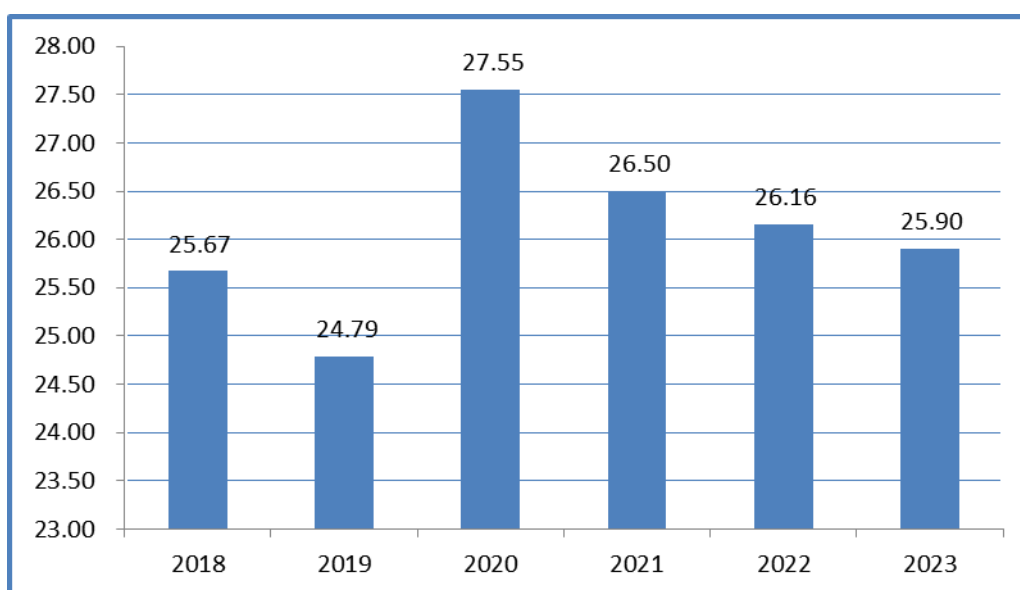
Secara konseptual, kemiskinan merupakan persoalan sosial dan ekonomi yang kompleks serta multidimensional. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik pangan maupun non-pangan, yang ditentukan berdasarkan garis kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2022). Sementara itu, Bank Dunia memaknai kemiskinan sebagai keterbatasan akses individu terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan politik yang esensial untuk menjalani kehidupan yang layak (Putra *et al.*, 2023).

Terdapat dua pendekatan utama dalam memahami kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif menggambarkan ketimpangan sosial akibat distribusi pendapatan yang tidak merata dalam masyarakat. Sementara itu, kemiskinan absolut merujuk pada kondisi di mana individu tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, dan hidup di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan secara nasional maupun internasional (Fuad *et al.*, 2020).

Dengan merujuk pada berbagai pandangan tersebut, kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok dalam

memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan, mencakup kebutuhan akan pangan, sandang, papan, layanan kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan esensial lainnya untuk mempertahankan kehidupan yang layak.

Indonesia sebagai negara berkembang masih menghadapi tantangan besar dalam menanggulangi kemiskinan. Berdasarkan data BPS dari tahun 2018 sampai 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebagai berikut:



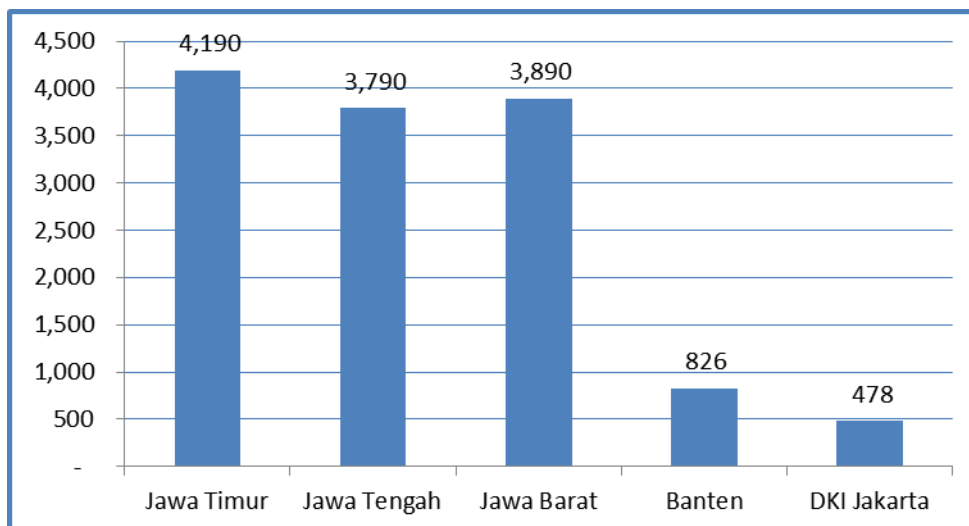
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin Indonesia (Juta Jiwa) tahun 2018-2023

Berdasarkan data diatas, Jumlah penduduk miskin Indonesia secara umum mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga 2023. Namun, pada tahun 2020 terjadi lonjakan signifikan akibat dampak pandemi COVID-19, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 27,55 juta jiwa. Seiring upaya pemulihan ekonomi nasional, angka kemiskinan kembali menurun setiap tahunnya. Penyebab utama kemiskinan meliputi terbatasnya lapangan kerja, rendahnya tingkat pendidikan, serta keterbatasan akses layanan kesehatan (Badan Pusat Statistik, 2023).

Di tingkat provinsi, Jawa Timur merupakan wilayah dengan jumlah

penduduk miskin tertinggi di Pulau Jawa sepanjang periode 2018–2023. Berdasarkan data BPS dari tahun 2018 sampai 2023, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 1. 2 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi – Provinsi utama di Pulau Jawa (Jiwa) tahun 2018-2023

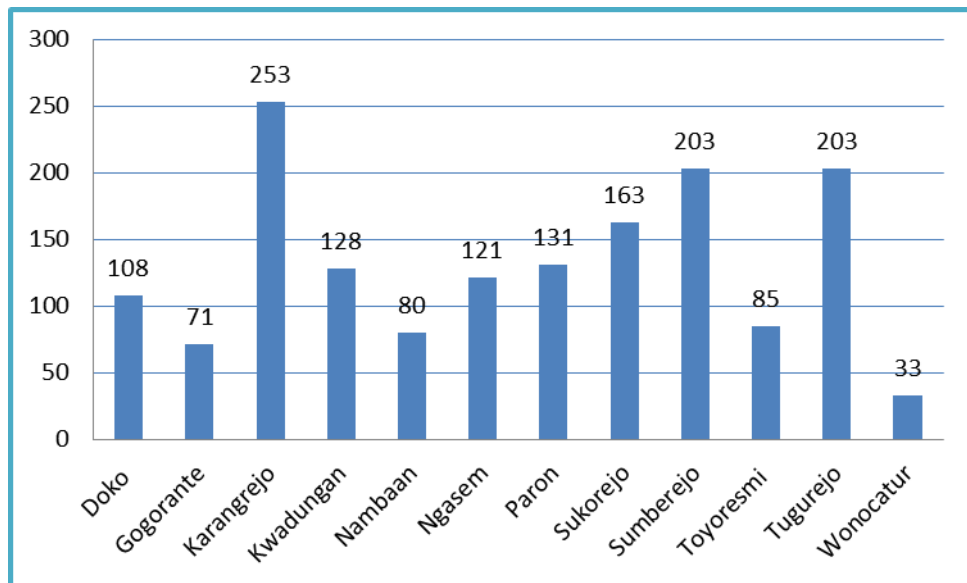
Berdasarkan data diatas, Jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 Jawa Timur tercatat sebesar 4,19 juta jiwa. Sebagai perbandingan, Jawa Tengah mencatat 3,79 juta jiwa dan Jawa Barat 3,89 juta jiwa. Faktor penyebab utama kemiskinan di Jawa Timur antara lain ketimpangan ekonomi antarwilayah, rendahnya produktivitas sektor pertanian, dan keterbatasan infrastruktur ekonomi. Kabupaten Kediri menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Rata-rata persentase penduduk miskin di Jawa Timur pada Maret 2023 adalah 10,35%, dan Kabupaten Kediri mencatat angka sedikit lebih tinggi. Dominasi sektor informal dengan penghasilan rendah, rendahnya akses pendidikan, serta kurangnya keterampilan tenaga kerja menjadi faktor yang memperburuk kondisi ini (Badan Pusat Statistik, 2023). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah meluncurkan berbagai

program bantuan sosial, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan bentuk intervensi perlindungan sosial yang bertujuan memberikan bantuan bersyarat kepada keluarga miskin guna meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.

Sebagai wujud implementasi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara memiliki tanggung jawab dalam melindungi dan memajukan kesejahteraan masyarakat. PKH, yang diluncurkan sejak tahun 2007, merupakan program bantuan sosial bersyarat (*conditional cash transfer*) yang telah terbukti berhasil menekan angka kemiskinan kronis di berbagai negara. Program ini menyasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin melalui peningkatan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan (Kementerian Sosial RI, 2021).

Kriteria penerima PKH antara lain mencakup daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, angka gizi buruk yang signifikan, serta keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar. Komitmen pemerintah daerah juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program ini (Kementerian Sosial RI, 2021).

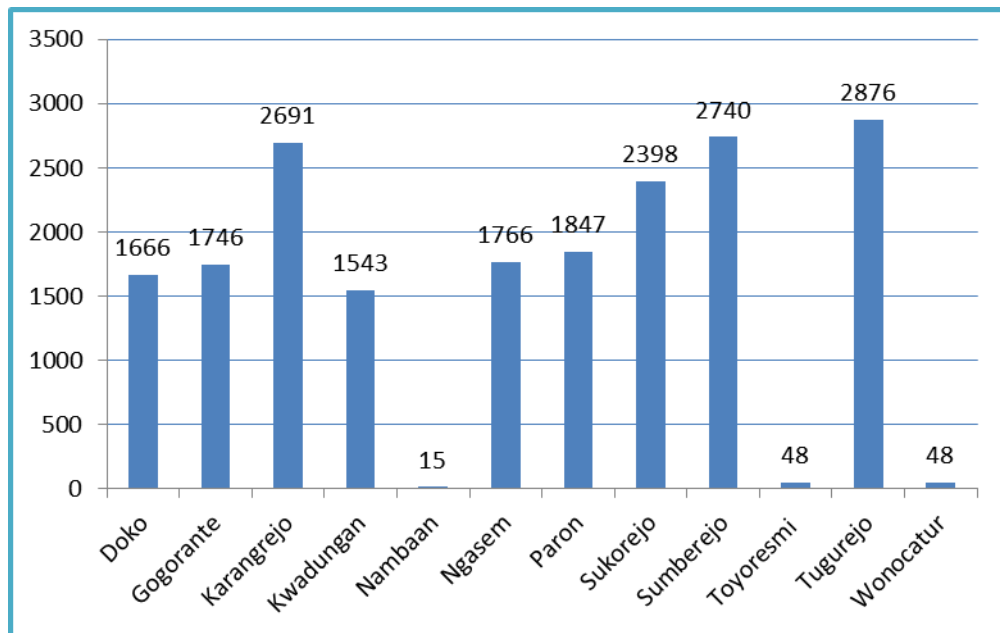
Di Kabupaten Kediri, khususnya Kecamatan Ngasem, implementasi PKH menjadi sangat relevan mengingat masih tingginya angka kemiskinan. Kecamatan ini terdiri dari 12 desa, salah satunya adalah Desa Karangrejo. Berikut data jumlah penerima PKH di Kecamatan Ngasem tahun 2023 :



Sumber : Unit Pelaksana PKH Kecamatan Ngasem, 2023

Gambar 1. 3 Jumlah Penerima PKH di Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri (KPM)

Berdasarkan data diatas, total penerima PKH di 12 desa di Kecamatan Ngasem tahun 2023 sebanyak 1.562 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Berdasarkan data tahun 2022, jumlah total penerima PKH di Kecamatan Ngasem mencapai 1.562 KPM. Desa Karangrejo tercatat sebagai desa dengan jumlah penerima PKH tertinggi, yaitu sebanyak 248 KPM. Namun, yang menarik adalah kenyataan bahwa Desa Karangrejo hanya menempati peringkat ketiga dalam jumlah penduduk miskin, setelah Desa Tugurejo dan Sumberejo, dengan jumlah 2.691 jiwa. Berikut data jumlah penduduk miskin Kecamatan Ngasem :



Sumber : Unit Pelaksana PKH Kecamatan Ngasem, 2023

Gambar 1. 4 Jumlah Penduduk Miskin Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri (jiwa)

Berdasarkan data diatas, Desa Karangrejo yang memiliki sektor industri pengolahan tergolong paling dominan di Kecamatan Ngasem, jumlah penerima PKH yang tinggi menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian antara data penerima bantuan dengan kondisi kemiskinan yang sebenarnya.

Kajian terkait Program Keluarga Harapan (PKH) umumnya masih terfokus pada skala makro seperti nasional dan provinsi. Padahal, pemahaman atas efektivitas program di tingkat mikro seperti desa menjadi penting untuk menilai ketepatan sasaran dan efisiensi pelaksanaannya. Studi yang mengkaji dinamika distribusi bantuan sosial dalam konteks desa masih sangat terbatas.

Desa Karangrejo merupakan contoh menarik dalam hal ini. Pada tahun 2022 hingga 2023, desa tersebut memiliki jumlah penerima PKH tertinggi di Kecamatan Ngasem, namun hanya menempati posisi ketiga dalam jumlah penduduk miskin. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan terkait validitas data DTKS, kriteria penentuan penerima manfaat, serta efektivitas implementasi

program di lapangan.

Kesenjangan antara data jumlah penerima dan jumlah penduduk miskin ini menjadi landasan penting bagi penelitian ini, yang bertujuan mengevaluasi penyebab ketidaksesuaian tersebut serta menilai efektivitas PKH dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Karangrejo. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan kemiskinan di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dan diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan kebijakan bantuan sosial berbasis data yang lebih akurat dan kontekstual.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diketahui rumusan masalah dari penelitian ini yaitu

Bagaimana efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah tersebut adalah:

Untuk mengetahui efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengangan teori mengenai efektivitas program bantuan sosial dalam mengentaskan kemiskinan. Selain itu, penelitian ini dapat menambah wawasan akademik mengenai kebijakan sosial dan mekanisme pelaksanaan program bantuan bersyarat di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas PKH agar lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang lebih signifikan bagi kesehatan masyarakat miskin. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi pendamping PKH dan masyarakat penerima manfaat agar lebih memahami dan mengoptimalkan pemanfaatan bantuan yang diberikan.